

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan kewenangan kerapatan adat nagari (KAN) dalam memperkuat pemerintahan nagari di nagari silago dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan KAN di Sagari Silago.

Dari tiga indikator kewenangan (authority) yang telah di teliti bahwa KAN nagari silago, yakni indikator *Pertama*, menyalurkan aspirasi masyarakat KAN sudah menjakakan kewenangan nya dengan baik yakni dapat dilihat dari cara yang telah di lakukan dan sudah di jelaskan di atas. *Kedua*, melakukan pengawasn terhadap pemerintahan nagari, disini KAN dinagari silago kalo untuk mengawasi orang orang yang atau menjabat di pemerintahan nagari sudah di awasi secara baik akan tetapi disini KAN belum mampu mnegawasi program program pembangunan pemerintahan nagari. *Ketiga*, membuat rapat evaluasi pemerintahan nagari, disini dapat dilihat KAN belum membuat kegiatan ini, kenapa demikian yang terjadi di nagari silago yang membuat rapt evaluasi pemerintahan nagari yakni dari badan musywarah nagari (BAMUS),akan tetapi KAN juga ikut serta dalam hal ini.

Dilihat dari tiga indikator yang di bahas bahwa KAN belum mampu memperkuat pemerintahan nagari, karena hanya satu yang di jalankan oleh KAN secarah penuh dan duanya lagi belum mampu secarah penuh yang sesuai

dengan kewenaganya. Di sebabkan adanya tumpang tindih antara lembaga KAN dan BAMUS karenan lambatnya realisasi perda terbaru ini.

2. Tanggung jawab KAN di nagari Silago

Dilihat dari tiga indikator yang ada dalam tanggung jawab (responsibility) KAN dapat di simpulkan. *Pertama*, tanggung jawab KAN dalam menyelesaikan permasalahan adat budaya, dilihat dari paparan di atas dimana KAN di nagari silago sudah cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan adat dan sudah bisa dikatakan bisa memperkuat nagari silago. *Kedua*, tanggung jawab KAN dalam membuat kebijakan adat dan budaya, dilihat dari pemaparan di atas bahwa KAN ini belum membuat kebijakan mengenai adat dan budaya, akan tetapi KAN secara adat hanya mengikuti aturan aturan yang sudah ada dari ninik moyang, dan banyak juga aturan aturan yang dari nenek moyang tidak di pakai, kemungkinan tidak sesuai dengan pola pemikiran masyarakat sekarang, jadi disini KAN nagari silago belum mampu melestarikan adat dan budaya dengan membuat kebijakan-kebijakan baru yang sesuai dengan pola pemikiran masyarakat sekarang. *Ketiga*, membuat kegiatan pelestarian adat dan budaya, dilihat dari pemaparan di atas bahwa KAN sudah membuat kegiatan pelestarian adat dapat dilihat di atas yakni, untuk acara pernikahan, duduk rang tuo, dan turun mandi bagi anak yang baru lahir dan banyak hal yang lain menurut penyampaian ketua KAN.

Dilihat dari tanggung jawab KAN sudah bisa di katakan mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik meski belum semuanya dijalankan dengan baik.

Disini saya simpulkan bahwa tanggung jawab KAN sudah mampu memperkuat pemerintahan nagari.

3. Akuntabilitas KAN di nagari Silago

Dilihat dari akuntabilitas (accountability) KAN di nagari silago dapat disimpulkan bahwa dari tiga indikator hanya satu yang dijalankan dengan baik yakni membuat rapat evaluasi kerja bersama masyarakat. Berarti akuntabilitas KAN belum sepenuhnya di jalankan, dapat saya simpulkan secara akuntabilitas KAN belum mampu memperkuat pemerintahan nagari.

Melihat kesimpulan di atas dapat penulis simpulkan secara garis besar KAN belum mampu memperkuat pemerintahan nagari secara penuh dilihat dari kewenangan KAN. Dari sembilan indikator bisa terjalankan dengan cukup baik lima indikator dan empat indikator tidak terjalankan dengan baik. Bisa dikatakan kurang dari 60% yang sudah dijalankan dengan cukup baik.

Dengan tidak terjalankan 4 kewenangan ini di sebabkan oleh berbagai persoalan seperti kurangnya SDM dari KAN tersebut, kurangnya di ikut sertakan KAN dalam proses pemerintahan, terlihat jelasnya pembagian kewenangan KAN antara pemerintah nagari dengan KAN, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten maupun provinsi mengenai KAN, dan kurangnya pemahaman KAN mengenai kewangannya.

Kesimpulan secara garis besar bahwa KAN di nagari Silago tidak mengikuti aturan yang telah di buat oleh pemerintahan provinsi maupun kabupaten, ini dapat dilihat dari struktural dan keuangan KAN, dimana KAN dalam hal ini jelas

sekali tidak mengikuti aturan, sesuai dengan penyampaian ketua KAN yang di wawancara.

B. Saran

Untuk menciptakan nagari silago yang kuat, maju, berkembang dan berdaulat tentu seluruh elemen yang ada dalam nagari silago harus bekerja dengan baik dan mengikuti aturan serta kebijakan yang ada. KAN yang sebagai salah satu lembaga yang sangat di hargai masyarakat lebih dari kepala nagari tentu harus berperan penting dalam mensejahterahkan masyarakat.

1. Seharusnya KAN harus memahami kewenangan-kewenangan yang telah di berikan, baik kewenangan, tanggung jawab, dan transparansi kepada masyarakat. Tentu harus dilakukan dengan baik, agar masyarakat makin percaya dan menghargai KAN khususnya ninik mamak.
2. Pemerintahan nagari silago yang resmi dari pemerintahan pusat harus memberikan kebebasan dan lebih banyak berkomunikasi dengan KAN ini, karena sudah di jelaskan di atas bahwa KAN ini lah yang lebih tau dan paham apa yang terjadi di masyarakat, karna KAN ini sebagai utusan dari masyarakat.
3. Pemerintahan nagari silago harus memberikan pelatihan mengenai kewenangan, tufoksi, dan kerja KAN yang ada dalam perda daerah maupun provinsi, agar KAN paham apa saja yang bisa dia lakukan. Pada intinya pemerintahan nagari dan KAN harus sering berkomunikasi dalam mensejahterakan masyarakat, dan KAN nagari silago harus tau apa yang sudah dilimpahkan kepadanya yang tertuang dalam peraturan daerah

maupun peraturan provinsi. Kalo semua kewenangan KAN ini terpenuhi maka kuat lah nagari silago.

4. Pemerintahan provinsi Sumatera Barat harus segera merealisasikan perda terbaru yakni perda no 7 tahun 2018 secepatnya kepada Nagari dan memberikan pelatihan pelatiha kepada lembaga KAN mengensi kewenangn dan tufoksinya.
5. Pembinaan KAN dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi SumateraBarat, Camat, Bupatiserta Gubernur Sumatera Barat. Seharusnya lebih optimal lagi dalam melakukan pembianan kepada KAN.